

PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Ikke Febriandhika¹, Teguh Kurniawan²

¹Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Indonesia

²Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Indonesia

Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Informasi Artikel

Dikirim: 2 Maret 2019

Diterima: 2 Juni 2020

Korespondensi pada penulis :

Telepon:

0821 1152 1993

Email:

ikke_feabriandhika@yahoo.com

Abstract

Tourism has an important contribution to development, so to realize sustainable tourism requires effective policy and planning. Then, one of the pillars in tourism development strategies is through community empowerment. However, in the tourism development policy implementation through community empowerment doesn't work as planned. The purpose of this study is to offer a review of the tourism development policy through community empowerment and what are influencing factors of the tourism development policy implementation through community empowerment. This study used qualitative research methods through literature studies. These study findings show that tourism development policy through community empowerment have to prioritize the needs of the local community itself, in addition the aspects of tourists and tourism service providers. Tourism development policy comes from the community, by the community, and for the community. Through community empowerment can increase participation and active involvement of local community in order to develop local tourism. Factors affecting tourism development policy through community empowerment consist of internal and external factor. Internal factors related to social, cultural, environmental, and local resources. While external factors related to political support and interest groups within the tourism policy itself.

Keywords: *Community empowerment; Tourism; Tourism policy; Tourism policy implementation*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan banyak sektor dan lembaga. Selain itu, pariwisata bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek lingkungan, politik, dan sosial budaya. UNWTO (1980) menjelaskan, bahwa pariwisata berhubungan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya menjadi berperan utama dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Berkerti (2015) juga mengungkapkan, pariwisata pada dasarnya bersifat multidimensi baik dimensi lingkungan fisik, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Pariwisata berpengaruh positif terutama di sektor ekonomi, yang mana dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, menciptakan iklim investasi, merangsang tumbuhnya industri ekonomi lainnya, menciptakan peluang lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Schubert, Brida, dan Risso, 2011). Sharpley *et al.* (2015) mengungkapkan, bahwa pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan karena dapat mempromosikan daerah yang kurang berkembang. Lebih lanjut, menurutnya di negara yang sektor pariwisatanya dominan, maka pariwisata dianggap sebagai sumber utama pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Chang *et al.* (2001), bahwa pariwisata sebagai aspek penting dalam pembentukan serikat ekonomi regional dan pembentukan perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan aliran barang dan jasa, serta peningkatan mobilitas investasi dan manusia. Azam *et al.* (2018), pariwisata berkontribusi besar pada perkembangan ekonomi tuan rumah dan banyak negara berkembang bergantung pada pengeluaran wisatawan yang menjadi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Dalam pengembangan pariwisata menurut Singgalen *et al.* (2017) terdapat beberapa komponen penting, antara lain industri pariwisata, tujuan wisata, pemasaran, dan lembaga pariwisata. Komponen-komponen tersebut melibatkan masyarakat lokal, wisatawan, pemerintah setempat, dan lembaga swasta. Keterlibatan dari setiap para pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan pariwisata untuk mewujudkan suatu keberlanjutan.

Kebijakan dan perencanaan yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, sehingga para pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan yang terlibat harus dapat membuat kebijakan pariwisata yang tidak merugikan wisatawan dan masyarakat (Edgell, Allen, Smith, Swanson, 2008). Untuk itu, kunci utamanya adalah pemberdayaan masyarakat (Sutawa, 2012), karena sebagai salah satu pilar dalam strategi pengembangan pariwisata (Cahyaningrum, 2017). Singgalen *et al.* (2017) mengungkapkan, bahwa dalam elemen penting destinasi pariwisata dibutuhkan pemberdayaan masyarakat yang koheren, terpadu, dan berkelanjutan.

Konsep pemberdayaan sendiri menurut Sutawa (2012) muncul sebagai upaya untuk memberikan hak bersuara atau berpendapat bagi komunitas lokal atau orang-orang pinggiran yang selama ini berada pada kondisi ketidakberdayaan. Pakasi (2012) menjelaskan, bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya berhubungan dengan nilai sosial. Masyarakat diberikan akses yang sama dengan lembaga dan organisasi lainnya terkait hak politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Esensi utama pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk upaya memfasilitasi masyarakat lokal untuk merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal, dengan mana tujuan akhirnya mewujudkan kemandirian (Karmilah, Nuryanti, Soewarno, dan Setiawan, 2014). Mulyawan (2016) menghubungkan pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan masyarakat (*community development*), pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*), dan pembangunan yang digerakkan masyarakat (*driven development*).

Shixiu *et al.* (2014) mengungkapkan, bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan komponen penting agar masyarakat di desa tersebut ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan pariwisata di desanya. Sinaga *et al.* (2018) juga mengungkapkan, bahwa pemberdayaan masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pengembangan objek wisata harus melalui proses yang membutuhkan pemahaman masyarakat. Adanya pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu strategi pengurangan atau pengentasan kemiskinan (Cahyaningrum, 2017; Scheyvens, 2011). Dengan kata lain, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Karmilah *et al.* (2014), bahwa dalam aspek ekonomi sektor pariwisata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan kerja, dan pengembangan kegiatan masyarakat di dalamnya. Di sisi lain, sektor pariwisata juga dapat mengurangi kemiskinan sosial melalui meningkatkan kreativitas budaya lokal, interaksi, dan etika hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dibutuhkan dukungan sebuah kebijakan pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin dan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Kebijakan pariwisata haruslah dapat merepresentasikan kondisi di masing-masing negara dengan komunitas yang beragam (Jenkins, 2015; OECD, 2018).

Namun, pada kenyataannya kebijakan yang ada terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan mana terkait proses pelaksanaannya. Krutwaysho *et al.* (2010) mengungkapkan, bahwa isu implementasi sangat penting untuk dianalisis karena banyaknya perencanaan pariwisata yang dilaksanakan sebagian saja ataupun bahkan diabaikan sama sekali. Lebih lanjut, implementasi kebijakan pariwisata berkaitan dengan lingkungan sosial, ekonomi, serta tradisi dan budaya masyarakat. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata tersebut menurut Singgalen *et al.* (2017), yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana kebijakannya, dan sistem birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji terkait kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat. Keduanya diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari perspektif implementasi kebijakan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena berupaya menelusuri data-data histories. Adapun menurut Creswell (2009) teknik pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui penelusuran dari berbagai literatur (riset kepustakaan), seperti buku dan jurnal. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai kajian pustaka terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Kemudian membaca dan mempelajari data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dijelaskan oleh Miles *et al.* (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, kondensasi data terkait pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data yang muncul dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan implementasi kebijakannya. Kedua, penyajian data merujuk pada penyusunan informasi-informasi yang sudah diperoleh melalui kajian pustaka dan disajikan secara naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan sebagai bentuk hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pariwisata

Keberadaan sektor pariwisata salah satunya dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat, sehingga perlunya dukungan kebijakan pariwisata yang dapat mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan pariwisata itu sendiri menurut Edgell *et al.* (2008) berupa tindakan, petunjuk, arahan, serta prinsip dan prosedur yang di dalamnya berisi tentang perencanaan, pengembangan, produk, sasaran, pemasaran, dan tujuan yang jelas terkait pariwisata yang berkelanjutan. Goeldner *et al.* (2012) menjelaskan tentang pentingnya kebijakan pariwisata, dengan mana sebagai aturan main agar pariwisata dapat berjalan sesuai fungsi dan tujuannya, menentukan kegiatan sikap, memberikan arahan dan petunjuk, memfasilitasi keterlibatan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan swasta, dan menjadi penggerak bagi sektor ekonomi lainnya.

Penyelenggaraan pariwisata di setiap negara bergantung pada kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan pemerintah, terutama terkait dengan sumber daya keuangan yang akan mendukung berjalannya kegiatan pariwisata itu sendiri. Untuk itulah, dalam memahami kebijakan pariwisata perlunya memahami struktur kebijakan dan konten kebijakannya (Goeldner dan Ritchie, 2012). Keduanya harus jelas mempertimbangkan tentang filosofi pariwisata, visi pariwisata, tujuan dan hambatan pariwisata, strategi pengembangan pasokan, struktur organisasi makromanajemen, serta kebijakan dan program pengembangan *supply-demand*.

Sebuah kebijakan pariwisata bukan hanya mengatur tentang bagaimana rencana pengembangan destinasi pariwisata itu sendiri, tetapi juga terkait dengan industri pariwisata, pemasarannya, dan kelembagaannya. Selain itu, terkait dengan siklus kebijakan pariwisata sendiri memang sama dengan kebijakan publik pada umumnya, tetapi dalam kebijakan pariwisata melibatkan interaksi berbagai sektor dan lembaga, serta individu-individu yang beragam dan memiliki kepentingan yang berbeda pula. Airey (2015) mengungkapkan, bahwa esensi dari kebijakan publik memberikan pemahaman tentang proses kebijakan pariwisata itu sendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dan bagaimana dampak kebijakan tersebut pada kelompok sasaran. Menurutnya, model kebijakan pariwisata dilihat dari tiga aspek, yaitu *policy input* terkait faktor internal dan eksternal, *policy process* merujuk bagaimana menginterpretasikan *input*, serta *policy outputs* dan *outcomes* terkait keluaran kebijakan yang dihasilkan.

Dalam pembuatan kebijakan pariwisata, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dari aspek wisatawan, penyedia jasa wisata, dan masyarakat lokal. Hal ini penting, karena dengan adanya pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan baik bagi wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut maupun juga masyarakat yang tinggal disana. Untuk itulah,

pentingnya membuat perencanaan terkait pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bukan hanya bertujuan untuk menarik pengunjung dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hal ini dikemukakan oleh Jenkins (2015), bahwa pentingnya kebijakan dan perencanaan pariwisata bukan hanya terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung, tetapi juga pengaruh pengembangan pariwisata internasional. Schubert *et al.* (2011) menjelaskan, bahwa pariwisata internasional memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pentingnya peranan sektor pariwisata bagi sebuah negara, maka pemerintah membutuhkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Richards dan Hall, 2000).

Pada prinsipnya pariwisata yang berkelanjutan harus dapat memanfaatkan sumber daya lingkungan dengan optimal, menghargai dan melestarikan keaslian warisan sosial-budaya masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pemangku kepentingan. Aspek kebijakan pariwisata yang berkelanjutan tersebut berfokus bagaimana melindungi lingkungan dan mendistribusikan manfaat ekonomi dan sosial secara adil kepada masyarakat, lembaga, dan juga organisasi yang terlibat. Selain itu, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal karena terkait bagaimana menjaga sumber daya wisata dan menghormati lingkungan mereka, sehingga dengan adanya pariwisata nantinya dapat memberikan manfaat bagi mereka (Angelevska-Najdeska dan Rakicevik, 2012). Di sisi lain Ismet *et al.* (2016) menjelaskan, bahwa kebijakan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan partisipasi dari berbagai sektor pemerintah, seperti transportasi, kebijakan pajak, akomodasi, konservasi lingkungan dan pembangunan sosial.

Pengembangan pariwisata yang efektif dan baik harus dapat bertumpu pada meningkatkan potensi lokal, yang mana pilar utamanya partisipasi masyarakat itu sendiri. Jika mengambil prinsip kebijakan publik, maka kebijakan pengembangan pariwisata haruslah berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dengan mana memberikan peluang besar kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi. Konsep ini terkait dengan pengembangan pariwisata kerakyatan, yang mana dijelaskan oleh Sharpley *et al.* (2008), bahwa pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk keberlanjutan sosial dan menghormati budaya, warisan, dan tradisi lokal. Seperti contohnya, di Desa Kasongan, Yogyakarta masyarakat bersama-sama dengan pemerintah lokal dan pemangku kepentingan lainnya berpartisipasi dalam sektor pariwisata (Karmilah, Nuryanti, Soewarno, dan Setiawan, 2014). Di Negara Kolombia, pariwisata dijadikan sebagai kekuatan untuk perdamaian, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, dan merangsang berkembangnya industri ekonomi lainnya.

Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, tentunya merujuk kepada bagaimana memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk aktif terlibat dalam mengelola dan mengontrol pariwisata di daerahnya. Paradigma konseptual terkait pengembangan wisata yang berkelanjutan, dengan mana dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas yang terdiri atas motivasi organisasi dan pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata ini sendiri terbagi atas empat (4) dimensi pemberdayaan, yang mana pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan psikologis, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan politik (Scheyvens, 1999). Keempatnya menekankan pentingnya komunitas lokal untuk memiliki kontrol atas pariwisata di daerahnya dan berbagi manfaat atas kegiatan pariwisata tersebut. Dengan kata lain, konsep pemberdayaan oleh dan dari masyarakat sebagai bentuk proses dan hasil yang manfaatnya jelas bagi sektor ekonomi, psikologis, sosial, dan politik.

Hernanda *et al.* (2018) menjelaskan, bahwa dalam prinsip tata kelola pariwisata yang baik dibutuhkan metode untuk memberdayakan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, sehingga dapat memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat lokal sangat penting dilibatkan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini juga diungkapkan oleh Albrecht (2010), pandangan masyarakat menentukan keterlibatan mereka dalam perencanaan pengembangan pariwisata itu sendiri, yang mana mereka akan mempertimbangkan dampak adanya pariwisata terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat menjadi sumber daya penting dalam sektor pariwisata, sehingga perencanaan pariwisata haruslah berfokus pada meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pembangunan kapasitas mereka.

Sinaga *et al.* (2018) menjelaskan, bahwa model implementasi pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dimulai dengan identifikasi, kesadaran, penguatan, perlindungan, dan kemandirian. Cahyaningrum (2017) juga mengungkapkan salah satu bentuk upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pariwisata dan potensi bisnis masyarakat di bidang pariwisata. Memahami wisatawan dan proses pelaksanaan kegiatan pariwisata merupakan tahap pertama memberdayakan masyarakat lokal, yang mana bertujuan membuat keputusan yang tepat dan sesuai informasi terkait pengembangan pariwisata di daerah mereka.

Butarbutar *et al.* (2012), salah satu faktor penting dalam pengelolaan pariwisata adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang mana lebih diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan pariwisata dan kemampuan mengembangkan inisiatif kegiatan pariwisata yang kreatif. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan kunci keberhasilan pengembangan pariwisata karena hal ini berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata diungkapkan oleh Butarbutar *et al.* (2012) dalam penelitiannya, bahwa adanya sistem pertanian yang memperhatikan kondisi iklim dan lingkungan di kawasan Gunung Mahawu Tomohon yang menghasilkan berbagai sayur-sayuran dan buah-buahan, sehingga dijadikan souvenir bagi wisatawan.

Adapun faktor-faktor penentu yang sangat penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, menurut Workie (2011) ditentukan oleh sistem administrasi daerah, pembagian manfaat yang adil, keterlibatan masyarakat, mobilisasi dan partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, pengembalian ekonomi, peluang kerja bagi komunitas lokal, kebijakan yang jelas, budaya keramahan masyarakat, pengembangan lokal, kebutuhan tenaga terampil dalam bidang pariwisata, kualitas lingkungan dan pengalaman pengunjung, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam sektor pariwisata harus terlebih dahulu didukung oleh pemahaman mereka tentang pengembangan pariwisata itu sendiri. Namun, partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nitikasetsoontorn (2015) yaitu, dipengaruhi oleh kepemilikan lokal terkait kemampuan masyarakat lokal mengelola daerahnya, inovasi lokal, tanggung jawab secara kolektif merujuk kepada kesadaran pengembangan pariwisata, berbagi sumber daya dan manfaat, kepemimpinan dan efektivitas manajemen yang berperan aktif dalam menyatukan penduduk lokal dan mendorong mereka untuk berpartisipasi, kemitraan dan dukungan dari luar, keaslian, dan perbedaan terkait dengan aset budaya dan warisan yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pariwisata seringkali lebih pasif, karena menurut Cole (2006) ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah setempat rendah, kurangnya dukungan modal, serta rendahnya keterampilan dan kepercayaan diri. Untuk itulah, dalam hal ini juga pentingnya aspek kepercayaan dan jejaring di antara para pemangku kepentingan, karena komponen penting dalam pengembangan masyarakat di sektor pariwisata harus didukung dengan pemberian kegiatan pendidikan dan pelatihan agar meningkatnya kapasitas masyarakat, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kapan saja.

Di sisi lain terdapat juga faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat yang didasarkan atas dukungan tata kelola pariwisata yang baik. Hernanda *et al.* (2018) menjelaskan, bahwa faktor pendukung secara internal terkait dengan sumber daya sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan lokal; dan secara eksternal berasal dari dukungan berbagai pemangku kepentingan pariwisata, khususnya dukungan politik dan kelompok kepentingan. Sedangkan, menurutnya faktor penghambat pemberdayaan masyarakat ini secara internal terkait tingkat pendidikan masyarakat, konflik ego sektoral; sedangkan secara eksternal merujuk kepada kendala infrastruktur yang masih belum sepenuhnya mendukung sektor pariwisata.

Jika dilihat dari kasus Tiongkok, adapun faktor-faktor yang memengaruhi ketidakberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata bersejarah terkait dengan kegagalan institusi politik dalam melindungi kepentingan masyarakat, konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah lokal, hubungan *principal-agent* terkait dengan peran ganda Komite Desa yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap Komite Desa (Weng dan Peng, 2014). Terkait dengan masalah kepercayaan ini juga menjadi isu penting dalam implementasi pariwisata berkelanjutan. Seperti contohnya di wilayah Akamas, Cyprus permasalahan implementasi

yang justru menonjol berhubungan dengan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat lokal, dalam mana mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Ioannides, 1995).

Di Indonesia sendiri, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata, salah satu contohnya pada Komunitas Bajo yang diungkapkan oleh Cahyaningrum (2017), bahwa masyarakat diberikan pelatihan oleh pemerintah daerah dan LSM dalam mengelola dan mengolah sumber daya lautnya. Selain itu, agar terwujudnya pemberdayaan Komunitas Bajo yang sukses, maka pemerintah daerahnya pun menjalin kerja sama dengan komunitas di luar Bajo untuk membangun jejaring kepercayaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Karmilah *et al.* (2014) dalam penelitiannya, bahwa LSM berperan penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Kasongan dengan menggali potensi dan sumber daya lokal. Dengan kata lain, dalam aspek sosial pemberdayaan masyarakat perlunya keterlibatan bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, melainkan juga dukungan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Implementasi Kebijakan

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan, bahwa kebijakan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri tidak berjalan dengan baik dan efektif karena seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat dan juga cenderung hanya mementingkan kepentingan sendiri. Untuk itulah perlunya pemahaman terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan pariwisata itu sendiri, khususnya faktor-faktor apa yang dapat memengaruhinya. Pada proses implementasinya, prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan terbukti sulit dilaksanakan. Kesulitan itu muncul karena pariwisata melibatkan perubahan politik, budaya, ekonomi, sosial, dan psikologis. Sebagaimana yang dijelaskan Krutwaysho *et al.* (2010), bahwa implementasi kebijakan pariwisata terhubung dengan proses kemasyarakatan yang mana di dalamnya berkaitan dengan konteks sosial mereka, termasuk ekonomi, pemerintahan, masyarakat, dan budaya. Pada prinsipnya kebijakan yang telah dibuat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan interaksi dari berbagai aspek lingkungan kebijakan, pelaksana yang sebenarnya, dan target kebijakannya. Goeldner *et al.* (2007) menjelaskan, bahwa dalam fase implementasi kebijakan pariwisata terkait siapa aparat pelaksana kebijakan tersebut; dukungan sumber daya keuangan; dukungan baik infrastruktur ataupun promosi.

Krutwaysho *et al.* (2010) melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan pariwisata yang berfokus pada masyarakat (*society centred*). Pendekatan ini mencoba mengungkap berbagai keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan konteks sosio-ekonomi, politik, pemerintahan, dan budaya. Di dalam implementasi tersebut terdapat berbagai interaksi yang terjadi antara berbagai kelompok dan individu dalam masyarakat, serta aktor di berbagai lembaga publik dan tingkat pemerintahan. Dalam pembuatan kebijakan pariwisata memang dipengaruhi oleh berbagai faktor karena sifatnya yang dinamis dan saling berkaitan dengan kebijakan lainnya. Lebih lanjut, kebijakan pariwisata dirumuskan melalui interaksi berbagai sektor, lembaga, dan individu. Albrecht (2010) menjelaskan, bahwa dalam perencanaan dan implementasi pariwisata berbasis komunitas ditentukan oleh pengaturan dan struktur pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, dan kelompok kepentingan. Selain itu, juga terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata itu sendiri bukan hanya dari segi aktor yang terlibat saja. Hal ini diungkapkan oleh Santa (2010), bahwa faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sebuah kebijakan pariwisata berkaitan dengan industri pariwisata yang terfragmentasi, isi kebijakan dan konteks implementasi, partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, dukungan sumber daya, kekuasaan dan politik.

Selain itu, Wang dan Ap (2013) mengembangkan kerangka kerja konseptual terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata dengan mempertimbangkan pendekatan secara *top-down*, *bottom-up*, dan sintesis (*hybrid*). Menurutnya, terdapat empat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata, antara lain lingkungan makro, pengaturan kelembagaan, hubungan dan koordinasi organisasi, dan kelompok kepentingan. Lingkungan makro terkait dengan faktor lingkungan yang secara khusus mencakup lingkungan ekonomi dan sosial. Pengaturan kelembagaan terkait dengan aturan dan norma yang mengatur perilaku implementor, meliputi struktur sistem administrasi publik dan pembagian wewenang dan tanggung jawab di dalam

birokrasi pemerintah, serta berhubungan dengan nilai dan pemahaman tentang peran dalam implementasi kebijakan. Hubungan dan koordinasi organisasi memiliki peran penting karena pariwisata bersifat multi sektor dan terfragmentasi. Pengaruh kelompok kepentingan, dengan mana sebuah asosiasi atau organisasi yang dapat memengaruhi kebijakan publik tanpa menggunakan kekuasaan formal pemerintah.

Hambatan implementasi kebijakan pariwisata, khususnya untuk mewujudkan suatu keberlanjutan menurut Dodds (2007) terkait dengan fokus utama ekonomi hanya jangka pendek, perencanaan yang kurang, keterlibatan pemangku kepentingan rendah, kurangnya integrasi antara kerangka kerja kebijakan nasional dan regional, akuntabilitas politik rendah, dan adanya konflik politik. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Krutwaysho (2006), yang mana dia mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisata di negara berkembang, antara lain masalah struktural dan politik, kejelasan kebijakan dan komunikasi kebijakan, hubungan organisasi antara dan diantara lembaga pemerintah dan nonpemerintah, kemauan politik dan komitmen, sumber daya kebijakan, dan masalah sosial-budaya. Dengan kata lain, hambatan dalam implementasi kebijakan pariwisata terkait dengan kurangnya dukungan politik, sumber daya keuangan terbatas, kapasitas kelembagaan terbatas, dan lemahnya kerja sama dan koordinasi di tingkat lokal.

Permasalahan implementasi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dapat dilihat dari aspek sosial hingga ke aspek kelembagannya sendiri. Dari aspek sosial terkait dengan rendahnya arus masuk wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata, konflik di antara masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan aspek keamanan untuk melakukan perjalanan wisata kurang. Masalah keamanan, seperti isu bencana alam, terorisme, dan lain sebagainya akan sangat memengaruhi keinginan wisatawan untuk berwisata. Lalu dari segi ekonomi meliputi kesenjangan standar kehidupan di daerah sekitarnya, sumber daya keuangan yang kurang, dan meningkatnya tekanan oleh masyarakat setempat. Kendala dari segi lingkungan merujuk kepada kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam dan budaya. Sedangkan, hambatan kelembagaan terkait dengan perencanaan strategis yang buruk, kurangnya insentif pemerintah, lemahnya koordinasi di antara pemangku kepentingan, dan kurangnya praktik manajemen pariwisata yang berkelanjutan. Pada praktiknya, masalah yang sering muncul saat implementasi kebijakan pariwisata itu sendiri berhubungan dengan pelaksana, yang mana interaksi di antara mereka masih rendah dan kemampuan mereka yang kurang

Dalam kasus Pulau Stewart di New Zealand, Albrecht (2010) menjelaskan, bahwa aspek-aspek yang memengaruhi lingkungan implementasi terkait dengan pengembangan pariwisatanya, antara lain peran dan keterlibatan pemangku kepentingan khususnya persepsi lokal terhadap pariwisata, keterlibatan pemerintah lokal dan stabilitas hubungan di antara para pemangku kepentingan, serta keterlibatan sukarelawan dan dukungan pemerintah. Dalam kasus Negara Filipina, adapun kondisi utama yang memengaruhi implementasi kebijakan pariwisatanya menurut Santa (2010) berhubungan dengan sistem politiknya atas dasar hubungan pribadi dan kekerabatan, adanya lobi dan negosiasi-negosiasi ulang yang memengaruhi keputusan kebijakan, bentuk pemerintahan yang oligarki, peran kekuatan yang muncul dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa, kapasitas negara yang lemah dalam pembuatan kebijakan, kurangnya sumber daya untuk pengembangan pariwisata, permasalahan koordinasi, dan rendahnya pemahaman terhadap pariwisata.

Adapun contoh kasus di Indonesia terkait dengan faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Berkahti (2015) di Wisata Bahari Pantai Selatbaru terkait dengan kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan para pelaku industri wisata, rendahnya pemahaman akan sadar wisata dan potensi pariwisata itu sendiri, tidak tersedianya tenaga profesional, dan terbatasnya alokasi anggaran. Selain itu, Sinaga *et al.* (2018) juga melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di Pulau Samosir menemukan, bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata karena kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, menurutnya pengembangan pariwisata juga tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya.

Ketidakterhasilan implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan ini menurut Dodds *et al.* (2010) dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu prioritas ekonomi, dukungan pemangku kepentingan, fokus pada pemilihan, koordinasi dan birokrasi, integrasi ke dalam bentuk kebijakan

yang lebih luas, kesadaran, ketidakpastian, dan sumber daya. Prioritas ekonomi lebih berkonsentrasi pada angka dibanding hasil, fokus jangka pendek, dan mementingkan pemasaran dibanding peningkatan produk. Dukungan pemangku kepentingan terkait dengan partisipasi yang rendah dan tidak memiliki visi dan komitmen jangka panjang. Fokus pada pemilihan merujuk kepada kemauan politik yang kurang dan berada pada partai politik oposisi. Koordinasi dan birokrasi terkait perebutan kekuasaan antarkementerian dan kurangnya komunikasi di antara otoritas terkait. Dalam hal integrasi ke dalam kebijakan yang lebih luas merujuk kepada kurangnya fokus holistik terkait pariwisata sebagai bagian dari ekonomi, kurangnya koordinasi dengan sektor lain, dan kurangnya integrasi dengan tingkat pemerintah lain. Kesadaran terkait dengan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya keterpaduan kebanggaan masyarakat atau nasional. Ketidakpastian terkait dengan definisi yang kurang jelas dan struktur peran dan tanggung jawab yang juga kurang. Sumber daya lebih kepada penggunaannya yang tidak efisien, terutama sumber daya finansial yang lebih banyak digunakan untuk pemasaran dibanding keberlanjutan. Di samping itu, implementasi kebijakan pariwisata yang buruk juga terkait dengan pemasaran dan promosinya yang juga buruk oleh pemerintah lokal, serta ketiadaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola dan mengontrol pariwisata tersebut.

Keterlibatan sektor swasta juga terkadang terbatas dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pariwisata, karena peran pemerintah yang sangat dominan. Oleh karena itu, dalam menciptakan sektor pariwisata yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat, maka penting untuk melihat jenis, skala, dan lokasi pengembangan pariwisata itu sendiri. Dengan kata lain, bagaimana komunitas lokal sebagai kelompok sasaran mau diajak bekerja sama di dalamnya. Kelompok sasaran merupakan sekelompok individu yang diharuskan untuk menyesuaikan pola interaksi baru sebuah kebijakan, sehingga mereka terpengaruh oleh kebijakan tersebut dan harus berubah untuk memenuhi tuntutan kebijakan tersebut (Smith, 1973). Pentingnya kelompok sasaran karena setiap kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam komunitas kebijakan tersebut, sehingga dalam kesiapan implementasi dibutuhkan peran kelompok sasaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pariwisata harus fokus pada kebijakan yang dirumuskan apakah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal, peran berbagai pemangku kepentingan harus jelas, dan adanya pengelolaan koordinasi dan interaksi yang tepat. Secara praktis implementasi kebijakan menurut Krutwaysho *et al.* (2010), melibatkan tujuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan negosiasi-negosiasi yang terjadi di antara para aktor di sekitar kebijakan tersebut. Faktor pendorong keberhasilan implementasi suatu pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, antara lain kerja sama pemangku kepentingan dan kemitraan; kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan pariwisata; akses transportasi yang memadai; dukungan sumber daya keuangan dan lainnya; keinginan politik; dukungan masyarakat; memiliki pemahaman terkait industri pariwisata; berfokus pada jangka panjang; menyediakan pendidikan pariwisata yang berkelanjutan; dan adanya sistem penghargaan, insentif, dan penalti dalam proses pelaksanaan kebijakan pariwisata tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat harus mementingkan kebutuhan masyarakat lokal karena mengingat mereka akan terpengaruh oleh kebijakan yang sudah diputuskan tersebut. Selain itu, juga harus dapat mencerminkan peluang, kondisi, dan prioritas pembangunan di negara tersebut. Berdasarkan kajian literatur menunjukkan, bahwa di dalam implementasi kebijakan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dihadapkan pada sejumlah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut, antara lain perencanaan kebijakan yang jelas dan efektif; memperhatikan aspek pengembangan pariwisata internasional; dukungan baik sumber daya keuangan yang cukup ataupun sumber daya manusia yang terampil dan ahli di bidang pariwisata; dukungan fisik berupa infrastruktur yang memadai; keterlibatan masyarakat lokal; dukungan lembaga nonpemerintah, swasta, dan kelompok kepentingan; kondisi sosial, ekonomi, politik; pengaturan kelembagaan; hubungan kerja sama dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang berlandaskan saling percaya; dan kapasitas kelembagaan.

Kedua kajian konseptual ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih luas yang lagi terkait dengan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dilihat dari perspektif implementasi kebijakan. Akan tetapi, perkembangan konsep ini harus dikaji kembali oleh para sarjana administrasi publik dalam agenda penelitian selanjutnya di masa depan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Airey, David. (2015). Developments in Understanding Tourism Policy. *Tourism Review*, Vol. 70, No. 4, pp. 246-258. Emerald Group Publishing Limited, United Kingdom.
- Albrecht, Julian Nina. (2010). Challenges in Tourism Strategy Implementation in Peripheral Destinations – The Case of Stewart Island, New Zealand. *Tourism and Hospitality Planning & Development*, Vol. 7, No. 2, pp. 91-110. Taylor & Francis Group, Abingdon.
- Angelevska-Najdeska, Katerina, & Rakicevik, Gabriela. (2012). Planning of Sustainable Tourism Development. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 44, pp. 210-220. Elsevier, Amsterdam.
- Azam, Muhammad, Alam, Md Mahmudul, & Hafeez, Muhammad Haroon. (2018). Effect of Tourism on Environmental Pollution: Further Evidence from Malaysia, Singapore, and Thailand. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 190, pp. 330-338. Elsevier, Amsterdam.
- Berkahti, Shintarani. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM FISIP)*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Briassoulis, Helen. (2000). Sustainable Tourism Policy Implementation: An Ex Ante Critical Examination. *Tourism and the Environment*, Vol. 6, pp. 255-282. Springer Link, New York City.
- Butarbutar, Regina R., & Soemarno. (2012). Community Empowerment Efforts in Sustainable Ecotourism Management in North Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, Vol. 3, No. 1, pp. 1-7. Universitas Brawijaya, Indonesia.
- Cahyaningrum, Dinis. (2017). Community Empowerment Based Local Wisdom in Tourism of Bajo Community, Wakatobi. *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol. 6, No. 11, pp. 196-201.
- Chang, Peggy Teo T.C., & K.C. Ho. (2001). *Interconnected Worlds – Tourism in Southeast Asia*. UK: Elsevier Science.
- Cole, Stroma. (2006). Information and Empowerment: The Keys to Achieving Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 14, No. 6, pp. 629-644. Taylor & Francis Group, Abingdon.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design – Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches – Third Edition*. USA: Sage.
- Dan Wang, & John Ap. (2013). Factors Affecting Tourism in Policy Implementation: A Conceptual Framework and a Case Study in China. *Tourism Management*, Vol. 36, 221-233. Elsevier, Amsterdam.

- Dodds, Rachel. (2007). Sustainable Tourism and Policy Implementation: Lessons From The Case of Calviá, Spain. *Current Issues in Tourism*, Vol. 10, No. 4, pp. 296-322. Taylor & Francis Group, Abingdon.
- Dodds, Rachel, & Butler, Richard. (2010). Barriers To Implementing Sustainable Tourism Policy in Mass Tourism Destinations. *Tourism: An International Multidisciplinary Journal of Tourism*, 5, 35-53. University Library of Munich, Jerman.
- Edgell Sr, David L., Allen, Maria DelMastro, Smith, Ginger, & Swanson, Jason R. (2008). *Tourism Policy and Planning (Yesterday, Today and Tomorrow)*. UK: Elsevier.
- Goeldner, Charles R, & Ritchie, J.R. Brent. (2012). *Tourism – Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hernanda, Dedy Wahyu, Mindarti, Lely Indah, & Riyanto. (2018). Community Empowerment Based on Good Tourism Governance in The Development of Tourism Destination (Case Study of Kawah Ijen Tourism Buffer Zone “Kampung Kopi” Gombengsari Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 6, No.2, pp. 126-135. Universitas Brawijaya, Indonesia.
- Ismet, E., & Abuhjeeleh M. (2016). The Analysis of Tourism Policies by Different Governments and Their Potential Implementation in North Cyprus Economy. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, Vol. 4, No. 4, pp. 1-13.
- Ioannides, Dimitri. (1995). A Flawed Implementation of Sustainable Tourism: The Experience of Akamas, Cyprus. *Tourism Management*, Vol. 16, No. 8, pp. 583-592. Elsevier, Amsterdam.
- Jenkins, Carson. L. (2015). Tourism Policy and Planning for Developing Countries: Some Critical Issue. *Tourism Recreation Research*, Vol. 40, No. 2, pp. 144-156. Taylor & Francis Group, Abingdon.
- Karmilah, Mila, Nuryanti, Wiendu, Soewarno, Nindy, & Setiawan, Bakti. (2014). Community Involvement in Tourism Development: As Strategy for Poverty Alleviation After The Earthquake (Case Study: Kasongan Village Yogyakarta). *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol. 4, No. 12, pp. 1-7.
- Krutwaysho, Oratai, & Bramwell, Bill. (2010). Tourism Policy Implementation and Society. *Annals of Tourism Research*, Vol. 37, No. 3, pp. 670-691. Elsevier, Amsterdam.
- Krutwaysho, Oratai. (2006). *Tourism Policy Implementation in The Developing World: The Case of Phuket, Thailand - Thesis*. UK: Sheffield Hallam University.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldafia, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis-A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: SAGE Publications.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD Press.
- Nitikasetsoontorn, Suthamma. (2015). The Success Factors of Community-Based Tourism in Thailand. *NIDA Development Journal*, Vol. 55, No. 2, pp. 24-58.
- OECD. (2018). *OECD Tourism Trends and Policies 2018*. Paris: OECD Publishing.
- Pakasi, Usman. (2012). Local Community Empowerment in The Special Autonomy Law in Papua Province. *Journal of Government and Politics*, Vol. 3, No. 2, pp. 355-371. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

- Richards, Greg, & Hall, Derek. (2000). *Tourism and Sustainable Community Development*. London: Routledge.
- Santa, Edieser Dela. (2010). *Tourism Policy Implementation in The Philippines - Thesis*. New Zealand: University of Otago.
- Scheyvens, Regina. (2011). *Tourism and Poverty*. New York: Routledge.
- Scheyvens, Regina. (1999). Case Study – Ecotourism and The Empowerment of Local Communities. *Tourism Management*, Vol. 20, No. 2, pp. 245-249. Elsevier, Amsterdam.
- Schubert, Stefan Franz, Brida, Gabriel, & Risso, Wiston Adrián. (2011). The Impacts of of International Tourism Demand on Economic Growth of Small Economies Dependent on Tourism. *Tourism Management*, Vol. 32, No. 2, pp. 377-385. Elsevier, Amsterdam.
- Sharpley, Richard, & Telfer, David J. (2015). *Tourism and Development – Concepts and Issues 2nd Edition*. UK: Channel View Publications.
- Sharpley, Richard, & Telfer, David J. (2008). *Tourism and Development In The Developing World*. Oxon: Routledge.
- Shixiu Weng, & Hua Peng. (2014). Tourism Developments, Rights Consciousness and The Empowerment of Chinese Historical Village Communitites. *Tourism Geographies*, Vol. 16, No. 5, pp. 772-784. Taylor & Francis Group, Abingdon.
- Sinaga, Kariaman, Lubis, Suwardi, Sihombing, Marlon, & Dalimunthe, Ritha F. (2018). Implementation of Community Empowerment-Based Tourism Development Policy (Case in Samosir Regency, Indonesia). *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol. 9, No. 9, pp. 585-599. IAEME Publication, India.
- Singgalen, Yerik Afrianto, Wiloso, Pamerdi Giri, & Sasongko, Gatot. (2017). Evaluation of the Implementation of Tourism Policy. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 21, No. 1, pp. 76-98. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Smith, Thomas B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, Vol. 4, No.2, pp. 197-209, JSTOR.
- Sutawa, Gusti Kade. (2012). Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development. *Procedia Economics and Finance*, Vol. 4, 413-422. Elsevier, Amsterdam.
- Workie, Alubel. (2011). *Assessment of Community Empowerment and Sustainable Tourism Development: The Case of Zege Peninsula, Bahir Dar - Thesis*. Ethiopia: Addis Ababa University.
- World Tourism Organization (UNWTO). (1980). *Manila Declaration on World Tourism*. Madrid: World Tourism Organization.